



PENINGKATAN PENGETAHUAN KADER MUDA PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) TENTANG PERAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PUBLIK GUNA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Poni Sukaesih Kurniati¹
¹Universitas Komputer Indonesia

INFO NASKAH

Diserahkan
4 April 2022
Diterima
6 Juni 2022
Diterima dan Disetujui
17 Juni 2023

Kata Kunci:

Pengetahuan, Partai Politik;
Golkar, kebijakan Publik,
Good Governance

Keywords:

*Knowledge, Political Parties;
Golkar, Public policy, Good
Governance*

ABSTRAK

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan kader muda Partai Golongan Karya (GOLKAR) tentang peran dan fungsi partai politik dalam kebijakan Publik guna mewujudkan good governance di Indonesia. Metode Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang digunakan adalah melalui pelatihan atau workshop yang dilaksanakan secara daring. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari melalui workshop dengan tehnik focus grup Discussion guna membahas masalah-masalah yang dihadapi kader muda partai golkar serta praktek dari materi yang diberikan terkait fungsi dari partai politik. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat menunjukkan bahwa fungsi partai GOLKAR belum berfungsi dengan optimal, terutama terkait fungsi pendidikan politik, komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan serta pengatur dan pengendali konflik dalam kaitannya dengan tahapan kebijakan publik yang mengarah pada terwujudnya good governance di Indonesia. Kesimpulannya adalah Parpol memiliki peran penting dalam kebijakan publik melalui ketaatan dan komitmen menerapkan nilai-nilai dan etika politik yang berlaku. Parpol juga memiliki peran untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara mengusulkan kepentingan-kepentingan rakyat untuk dijadikan kebijakan publik. Kalau parpol tidak melaksanakan peran itu, maka ia dapat ditinggalkan oleh pemilihnya dan kehilangan alasan eksistensinya.

Abstract. The purpose of this Community Service activity is to increase the knowledge of young cadres of the Golkar Party (GOLKAR) about the role and function of political parties in public policy to realize good governance in Indonesia. The Community Service Implementation Method used is through online training or workshops. The activity was carried out for two days through a workshop with a focus group discussion technique to discuss the problems faced by young Golkar party cadres and the practice of the material provided related to the functions of political parties. The results of Community Service indicate that the function of the GOLKAR party has not functioned optimally, especially concerning the functions of political education, political communication, articulation and aggregation of interests as well as regulating and controlling conflict with the stages of public policy that lead to the realization of good governance in Indonesia. The conclusion is that political parties have an important role in public policy through obedience and commitment to implementing applicable political values and ethics. Political parties also have a role in realizing the welfare of the people by proposing the interests of the people to become public policies. If a political party does not carry out that role, then it can be abandoned by its voters and lose the reason for its existence

1. PENDAHULUAN

Generasi muda Indonesia memiliki potensi yang besar untuk perpolitikan Indonesia. Jika harus menunjuk salah satu pihak dalam konstelasi politik nasional, yang seharusnya dapat mengelola potensi generasi muda, partai politiklah jawabannya. Potensi anak muda Generasi muda Indonesia hari ini memiliki potensi yang luar biasa. Mereka adalah angkatan muda Indonesia yang paling terdidik dan paling banyak mengenyam pendidikan tinggi dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Hal ini dikarenakan generasi muda merupakan suatu identitas bangsa yang meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan insan yang mempengaruhi pembangunan bangsanya (Nurmalisa, 2017).

Antusiasme politik anak muda yang terlihat dari partisipasi Pemilu 2019 dan berbagai sikap kolektif menyikapi kebijakan politik pasca pemilu presiden (pilpres) juga patut diperhitungkan (Pamungkas, 2020). Mereka berhasil mendobrak mitos tentang generasi muda yang dianggap paling apatis terhadap politik. Apabila dikelola dengan baik, potensi yang luar biasa ini bisa menjadi jawaban bagi partai politik untuk menghadapi tantangan politik yang kian dinamis, serta kebutuhan elektoral yang rasional. Namun, tampaknya belum banyak parpol yang bisa melihat momentum ini. Pasca-Pemilu 2019, selain partai-partai papan bawah, belum banyak parpol yang benar-benar menonjolkan kader-kader mudanya dalam organisasi kepartaian.

Melihat survei LSI per Agustus 2019, parpol menjadi lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan paling rendah. Tingkat kepercayaan publik terhadap parpol hanya berkisar diangka 53 persen (Jayani, 2019). Di sisi lain, sikap dan pandangan generasi muda yang mendominasi populasi Indonesia hari ini baik secara langsung maupun tidak langsung banyak memengaruhi dinamika politik nasional. Jika politisi partai melihat celah antara masalah dan peluang ini, parpol seharusnya menyusun strategi untuk melakukan rekrutmen sekaligus juga menempatkan generasi muda dalam jabatan strategis partai. Hal ini bisa menjadi jalan untuk mengurangi jarak antara persepsi negatif anak muda dengan kenyataan dinamika berkecimpung dalam politik praktis. Daripada berposisi berseberangan, parpol bisa merangkul generasi muda untuk menjadi brand ambassador organisasinya. Lebih jauh lagi, seandainya parpol bisa melakukan regenerasi kepemimpinan kepada politisi yang lebih muda, kemungkinan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada parpol lebih terbuka lebar.

Dengan perkembangan zaman dan berbagai tantangannya saat ini, pemikiran dan pendekatan anak muda yang segar akan membawa napas baru dalam strategi dan langkah

politik kepartaian. Pemikiran-pemikiran kritis generasi muda bisa dikonversi menjadi mesin yang membangun bagi parpol. Dalam konteks kalkulasi yang realistis, regenerasi dalam parpol juga merupakan investasi jangka panjang.

Data Pemilu 2019 yang menunjukkan besarnya angka pemilih pemula, secara tidak langsung memastikan bahwa Pemilu 2024 mendatang juga masih menjadi ajang bagi politisi-politisi muda (Badan Pusat Statistika, 2019). Pengawasan dan kepemimpinan generasi muda dalam parpol bisa menjadi tindakan preventif terhadap tokoh-tokoh muda populer “kutu loncat” yang marak muncul akibat kaderisasi instan pada tahun-tahun politik. Tanggung jawab dan kesempatan berkarya membangun partai bisa menjadi jalan untuk memupuk rasa kepemilikan kader-kader muda populer terhadap parpol dari mana ia berasal. Secara keseluruhan, pengawasan dan regenerasi kepemimpinan parpol kepada generasi muda bisa menjadi strategi kunci dalam konstelasi politik masa depan.

Salah satu partai politik yang turut mendukung dalam pengembangan pemuda sebagai regenasi kepemimpinan ialah Partai Golkar. Hal ini terlihat dari kondisi Partai Golkar yang tidak pernah kehabisan kader karena sistem regenerasi dan kaderisasinya baik. Kemenangan kader muda Golkar itu menunjukkan kaderisasi yang digalang berjalan baik di pusat dan daerah. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk kaderisasi dilakukan di level pusat dan daerah. Begitu pula di DPD Kabupaten Bandung, kader muda Golkar terus dikader guna memiliki pengetahuan politik lebih baik, sehingga partai berlambang pohon beringin ini bisa memiliki citra yang progresif, millenials friendly, dan fresh, dimana akan meningkatkan kualitas anak muda agar bisa bicara banyak di kancah politik dan memiliki kesempatan untuk bisa berkontribusi untuk negara melalui Partai Golkar.

Melihat fenomena tersebut di atas, maka pendidikan politik ini memang harus menjadi program berkala yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas diri kader muda Partai Golkar. Demikian pula dengan Partai Golkar DPD Kabupaten Bandung yang focus terhadap pembinaan kader mudanya untuk memiliki pengetahuan politik yang akan menjadi dasar dalam melaksanakan aktifitas politiknya.

Beranjak dari hal tersebut di atas, maka sebagai dosen Universitas Komputer Indonesia yang memiliki kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dimana salah satunya melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merasa perlu untuk melakukan diskusi dengan para kader muda Partai Golkar DPD Kabupaten Bandung guna meningkatkan pengetahuan tentang kebijakan politik. Pengetahuan Kebijakan politik ini sangat diperlukan, mengingat dengan aktifitas kader muda tatkala di masa saat ini maupun

masa yang akan datang harus mampu menyikapi dengan berbagai kebijakan politik.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- a. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pada kader muda Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bandung
- b. Mengidentifikasi sejauh mana pengetahuan kader muda fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bandung atas kebijakan politik di Indonesia
- c. Menganalisa tingkat pengetahuan kebijakan politik kader muda fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bandung
- d. Memberikan pengetahuan kebijakan politik kader muda Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bandung
- e. Meningkatkan pengetahuan kebijakan politik kader muda Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bandung
- f. Kader muda Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bandung menjadi meningkat pengetahuan tentang kebijakan politik.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui pelatihan/workshop serta diskusi secara daring, sebagai upaya untuk saling bertukar pikiran dan berdiskusi tentang Peran dan fungsi parpol dalam kebijakan public guna mewujudkan goodgovernance di Indonesia yang pada akhirnya akan berimbas pada meningkatnya pemahaman kader muda Partai Golkar tentang kebijakan publik. Jadwal Pelaksanaan PKM ini selama 8 bulan.

Jadwal Pelaksanaan

Adapun jadwal kegiatan PKM yang akan dilaksanakan selama selama delapan bulan dengan jadwal seperti terlihat pada table 1.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan PKM

No.	Uraian Kegiatan	2021							
		Mar	Apr	Me i	Ju n	Jul	Agt	Sept	Okt
1	Pembuatan Proposal								
2	Konsolidasi Mitra PKM								
3	Perumusan materi pelatihan								
4	Persiapan Pelaksanaan Pelatihan								
5	Pelaksanaan Pelatihan (1)								
6	Pelaksanaan Pelatihan (2)								
7	Pembuatan Laporan PKM								
8	Publikasi PKM di jurnal PKM terakreditasi Sinta								

Susunan kegiatan PKM dengan para peserta dapat dilihat pada table 2 .

Tabel 2. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Peningkatan Kapasitas Kader Muda Partai Golkar DPD Kabupaten Bandung

HARI/T GL	WAK TU	KEGIATAN	
Kamis, 29 Juni 2021	16.00 – 16.30	Pembukaan Sambutan Dekan FISIP Unikom Sambutan dan membuka kegiatan Ketua DPD Partai Golkar Kab. Bandung Doa	Kaprodi IP Unikom Assoc. Prof. Dr. Lilis Puspitawati, SE., M.Si.,AK.,CA. H. Sugianto, S.Ag., M.Si. Arijal
	16.30 – 18.00	Materi 1 : Komunikasi Politik yang memberdayakan. Tugas Untuk Bimtek hari kedua : Setiap Peserta menyiapkan pidato tentang program partai (durasi 3 menit).	Dr. Nia Karniawati, S.IP.,M.Si.
Jum'at,	15.30-	Materi 2 :	Tatik Rohmawati,

30 Juni 2021	16.10	Proses Legislatif yang demokratis	S.IP.,M.Si.
	16.10 – 16.50	Materi 3 : Peran dan tugas partai politik dalam kebijakan publik guna mewujudkan good governance.	Dr. Poni Sukaesih, S.IP.,M.Si.
	16.10 – 18.00	Praktek Penyampaian Pesan. Peserta dibagi kedalam 3 Kelompok untuk masuk ke dalam 3 ruang zoom. Setiap peserta akan diberi kesempatan untuk menyampaikan Pidato (durasi 3 menit)	Dr. Nia Karniawati, S.IP.,M.Si. Dr. Poni Sukaesih, S.IP.,M.Si. Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.

Foto Pelaksanaan Kegiatan:



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara teoretis Parpol setidaknya memiliki lima fungsi yang semestinya diperankan dalam proses kehidupan bernegara yang demokratis yaitu, (1) fungsi artikulasi kepentingan, (2) fungsi agregasi kepentingan, (3) fungsi sosialisasi politik, (4) fungsi rekrutmen politik, dan (5) fungsi komunikasi politik (Putra, 2003).

Artikulasi Kepentingan Setiap individu ataupun kelompok masyarakat sebagai warga negara memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan-kepentingan itu bisa sejalan dan bisa berbeda dan bahkan bertentangan satu sama lain. Parpol harus bisa memerankan fungsinya mengajukan kepentingan-kepentingan rakyat dalam proses perumusan kebijakan publik, sehingga kepentingan-kepentingan rakyat dapat terlayani oleh kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memegang kedaulatan. Kalau parpol mampu memerankan fungsinya mengajukan kepentingan-kepentingan rakyat seperti itu, maka parpol yang demikian akan memperoleh dukungan rakyat. Sebaliknya jika Parpol tidak mampu menyuarakan kepentingan rakyat, maka ia akan ditinggalkan oleh pemilihnya.

Agregasi Kepentingan Rakyat sebagai warga negara memiliki berbagai kepentingan yang diajukan untuk dipenuhi oleh kebijakan publik. Parpol dalam proses perumusan

kebijakan publik harus dapat memerankan fungsinya menggabungkan kepentingan-kepentingan yang merupakan tuntutan rakyat menjadi alternatif-alternatif terbaik yang memenuhi aspirasi rakyat. Menggabungkan kepentingan-kepentingan yang beragam yang terkadang bertentangan menjadi alternatif-alternatif terbaik membutuhkan intelektualitas yang tinggi. Parpol yang mampu memerankan fungsinya seperti itu akan menjadi pilihan rakyat. Sebaliknya Parpol yang tidak mampu memerankan fungsinya akan ditinggalkan.

Sosialisasi Politik Setiap negara memiliki nilai-nilai dan etika politik yang dipandang baik yang berlaku di negara yang bersangkutan. Parpol harus memerankan fungsinya mensosialisasikan nilai-nilai dan etika politik yang berlaku kepada warga negara. Sosialisasi nilai-nilai dan etika politik harus dilakukan secara terus-menerus. Warga negara supaya memperoleh sosialisasi politik seperti itu sepanjang hidupnya, sehingga nilai-nilai dan etika politik yang berlaku mempribadi pada diri warga negara. Parpol yang tidak melakukan sosialisasi politik seperti itu dapat dipertanyakan komitmennya terhadap negara. Di sisi lain rakyat seharusnya bisa berlaku kritis terhadap Parpol yang demikian. Misalnya untuk Indonesia, nilai-nilai dan etika politik yang berlaku adalah yang sejalan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Kaelan, 2009; Tim Penerbit Buku Pancasila, 2005). Parpol yang tidak menyosialisasikan nilai-nilai dan etika politik itu seharusnya tidak dipilih rakyat.

Rekrutmen Politik Parpol memiliki kepentingan untuk menempatkan kader-kadernya pada jabatan-jabatan politik di pemerintahan untuk menyuarakan dan mengajukan kepentingan partai dan rakyat yang diwakili. Agar dapat menempatkan kader-kader terbaik di pemerintahan, Parpol harus mampu memerankan fungsinya melakukan rekrutmen politik. Parpol harus memiliki prosedur rekrutmen politik yang diberlakukan bagi kadernya. Dalam rekrutmen politik inilah Parpol seharusnya menunjukkan kemampuannya berdemokrasi di internal partai. Kalau di internal partai tidak bisa berdemokrasi, bagaimana Parpol bisa berdemokrasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara?

Komunikasi Politik Melalui komunikasi politik Parpol mengomunikasikan informasi, isu, gagasan, dan program-program partai sehingga dapat diketahui oleh rakyat. Segenap struktur partai supaya dapat memerankan fungsinya melakukan komunikasi politik. Komunikasi politik ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia secara legal. Muara dari semua peran Parpol itu adalah formulasi dan implementasi kebijakan publik yang merespons kepentingan rakyat. Pemilih yang rasional akan memilih Parpol yang mampu memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang

merespons kepentingan rakyat. Jika Parpol tidak mampu melaksanakan peran dan fungsi yang demikian, maka akan ditinggalkan oleh konstituennya yang rasional (Rachbini, 2002). Karena itu Parpol semestinya mulai meninggalkan cara-cara yang tidak rasional dalam memengaruhi pemilih. Sejalan dengan peningkatan tingkat pendidikan, masyarakat akan berubah dari irasional ke rasional dalam menentukan pilihan.

Praxis Peran Partai Politik

Apakah Parpol Golkar di Indonesia sudah memerankan fungsinya secara semestinya dalam mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang santun dan kesejahteraan rakyat? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tergantung pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut.

- a. Apakah Parpol melakukan rekrutmen secara demokratis untuk ditempatkan pada jabatan-jabatan politis?
- b. Apakah Parpol sudah memerankan fungsinya mengusulkan kepentingan-kepentingan rakyat untuk dijadikan kebijakan publik? Apakah Parpol mampu memenuhi janji-janji pemilu?
- c. Apakah Parpol mampu mengelola berbagai kepentingan menjadi alternative-alternatif kebijakan publik?
- d. Apakah Parpol sudah memerankan fungsinya menyosialisasikan nilai-nilai dan etika politik yang berlaku? Apakah Parpol sudah betul-betul memiliki komitmen terhadap Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI?
- e. Apakah Parpol sudah memerankan fungsinya menyampaikan informasi, isu, gagasan, dan program-program partai yang bermanfaat bagi rakyat?

Jika jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas positif, maka Parpol telah berupaya dalam mewujudkan kehidupan berdemokrasi. Juga Parpol telah berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara mengusulkan kepentingan-kepentingan rakyat untuk dijadikan kebijakan publik. Jika sebaliknya yang dilakukan oleh Parpol, maka sesuai dengan teori pilihan publik (Rachbini, 2002) maka parpol yang demikian akan ditinggalkan oleh pemilihnya.

4. SIMPULAN

Partai Politik (GOLKAR) memiliki peran yang sangat penting dalam kebijakan public di Indonesia. Partai sebagai sarana pendidikan politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, penyalur artikulasi dan agregasi kepentingan politik, pengatur dan pengendali konflik,

rekrutmen politik, serta partisipasi politik sangat memiliki kontribusi besar dalam perumusan kebijakan public, implementasi dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, partai hendaklah memiliki kemampuan bagaimana menggali masalah-masalah public serta kepentingan-kepentingan public yang menjadi aspirasi masyarakat untuk diselesaikan dengan kebijakan yang didasari prinsip good governance.

DAFTAR PUSTAKA

- Surbakti, R. (1992). *Memahami-Ilmu-Politik*, Jakarta: PT GRASINDO
- Alie, M. (2013). *Pemasaran Politik di Era Multi Partai*. Bandung: Mizan Publika
- Badan Pusat Statistka, (2019). *Statistik Politik 2019*.
<https://www.bps.go.id/publication/2019/12/17/0da6c0d9d84d5200d4d38799/statistik-politik-2019.html>
- Bambang, S, dan Sugianto. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Gemunggung Solo: Penerbit Grahadi
- Eman, H. (2002). *Politik Membela Yang Benar; teori, kritik, dan nalar* : Yogyakarta
- Hendra. (2006). *Fisafat Demokrasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jayani, D H. (2019). *Tingkat Kepercayaan terhadap Institusi Publik 2019*. Databoks.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/30/survei-lsi-kpk-dan-presiden-jadi-lembaga-yang-paling-dipercaya-publik>.
- Kaelan. (2009). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Nurmalisa, Y. (2017). *Pendidikan generasi muda*. Universitas Lampung : Media Akademi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Pamungkas, D P. (2020). *Menempatkan Anak Muda dalam Partai Politik*.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/11295671/menempatkan-anak-muda-dalam-partai-politik>. Jakarta : Kompas.
- Putra, F. (2003). *Partai Politik dan Kebijakan Publik, Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachbini, D J. (2002). *Ekonomi Politik, Paradigma dan Teori Pilihan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gani, S. I. (1984). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- HI, A. R. (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*. LN.2011/No. 8, TLN No. 5189, LL SETNEG: 15 HLM
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD*